

**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2016**



**BADAN KETAHANAN PANGAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
2016**

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka dianggap perlu dilakukan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan SKPD Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ini bertujuan agar dapat diketahuinya target-target pencapaian pada tahun 2016 dan target strateis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.

Semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bermanfaat bagi pengambil kebijakan dan pelaksana program/kegiatan di bidang ketahanan pangan.

Bandar Lampung, Juli 2015

Kepala Badan,

Ir. KUSNARDI, M.Agr. Ec

Pembina Utama Madya

NIP. 19631123 198803 1 005

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2016 merupakan tahun Kedua dalam RPJMD, Rencana Kinerja Tahun Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung secara umum sebagai berikut :

I. Tujuan Rencana Kinerja Tahunan 2016

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Misi Pertama : Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian pangan

Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi ketimpangan pembangunan daerah

Indikator Tujuan : PDRB per kapita atas dasar harga berlaku

II. Sasaran Strategis

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai sasaran strategis sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:

- Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per-kapita

III. Sasaran Kinerja Tahun 2016

1. Meningkatnya keragaman konsumen pangan yang sehat dan aman dengan indikator Skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi 86,2 tahun 2016
2. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat sesuai angka kecukupan gizi (AKG) dengan indikator Konsumsi energi (2040 kkal/kap/hr); konsumsi protein (56,4 gram/kap/hari)
3. Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam dengan indikator Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan : Target skor PPH 89,71 tahun 2016
4. Menurunnya jumlah penduduk rawan pangan dengan indikator Persentase Penurunan jumlah penduduk rawan pangan sebesar 1 %
5. Stabilitasnya harga pangan pokok di tingkat produsen dan konsumen dengan indikator harga pangan pokok di tingkat produsen \geq Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan indikator harga pangan pokok di tingkat konsumen \leq Coefisien Variant (CV) sebesar 10%
6. Meningkatnya keamanan Pangan dengan indikator persentase Keamanan pangan segar (Uji Laboratorium) $>$ 80%
7. Peningkatan Produk Pangan Segar yang tersertifikasi sebanyak 10% pada akhir RPJMD

Bandar Lampung, Juli 2015
Kepala Badan,

Ir. KUSNARDI, M.Agr. Ec
Pembina Utama Madya
NIP. 19631123 198803 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
HALAMAN RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	1
1.1.2 Sumber Daya Manusia.....	3
1.1.3 Struktur Organisasi	3
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	4
1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.....	4
1.3 Ruang Lingkup	5
BAB II VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019	7
2.1 VISI.....	7
2.2 MISI.....	9
BAB III RENCANA KINERJA TAHUN 2016	11
3.1 Tujuan.....	11
3.2 Sasaran.....	11
3.3 Program	13
3.4 Kegiatan.....	13
3.5 Matrik Rencana Kinerja Tahunan 2016.....	14
3.6 Anggaran Tahun 2016	15
BAB IV PENUTUP	21
LAMPIRAN	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kelembagaan di bidang Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dimulai pada saat pembentukan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Ketahanan Pangan pada tahun 2000 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000. Saat itu pembangunan di bidang ketahanan pangan ditangani oleh Sub Dinas Ketahanan Pangan. Selanjutnya pada tahun 2007 melalui melalui Perda Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung tanggal 1 Maret 2007 dibentuk Badan Ketahanan Pangan Daerah. Kemudian diperbaharui melalui Perda Nomor 12 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Sejak awal tahun anggaran 2008 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi mulai menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam bidang ketahanan pangan.

Dalam perjalanannya, untuk perbaikan kinerja maka struktur organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah telah mengalami perbaikan melalui Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Provinsi Lampung. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung. Saat ini Badan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang ketahanan pangan;
3. Pembiayaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di dibidang ketahanan pangan;
5. Pengelolaan administrasi

Pembangunan ketahanan pangan, sangat diperlukan kerjasama yang sinergis dan terarah antar institusi dan komponen masyarakat serta koordinasi program dan kegiatan berbagai subsektor dan sektor. Guna mewujudkan sinergi dan harmonisasi kebijakan dan program, serta memperkuat koordinasi peningkatan ketahanan pangan antar sektor, antar wilayah, dan antar waktu, dibentuk Dewan Ketahanan Pangan (DKP) yang bertugas merumuskan kebijakan serta melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 tanggal 2 April tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 25 tahun 2013 tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP), dalam peraturan ini Gubernur berkedudukan sebagai ketua dan Wakil Gubernur sebagai ketua harian.

BKP selaku Sekretariat DKP memfasilitasi pelaksanaan tugas Wakil Gubernur selaku Ketua Harian DKP dalam membantu Gubernur untuk :

1. Merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional; dan
2. Merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan
3. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan.

Tugas BADAN Ketahanan Pangan Daerah meliputi kegiatan di bidang: penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, serta mutu dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Badan Ketahanan Pangan Daerah provinsi Lampung didukung oleh 6 Eselon III dengan struktur organisasi, yaitu:

1. Sekretariat Badan,
mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan,
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, pemantapan ketersediaan dan akses pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan

3. Bidang Distribusi dan Harga Pangan,
mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan distribusi dan harga pangan serta cadangan pangan.
4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan konsumsi dan keamanan pangan.
5. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, identifikasi, pembinaan, pengembangan dan pemantauan serta pengendalian mutu dan keamanan pangan
6. UPT
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang sertifikasi mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan pangan dan kepastian.

1.1.2 Sumber Daya Manusia

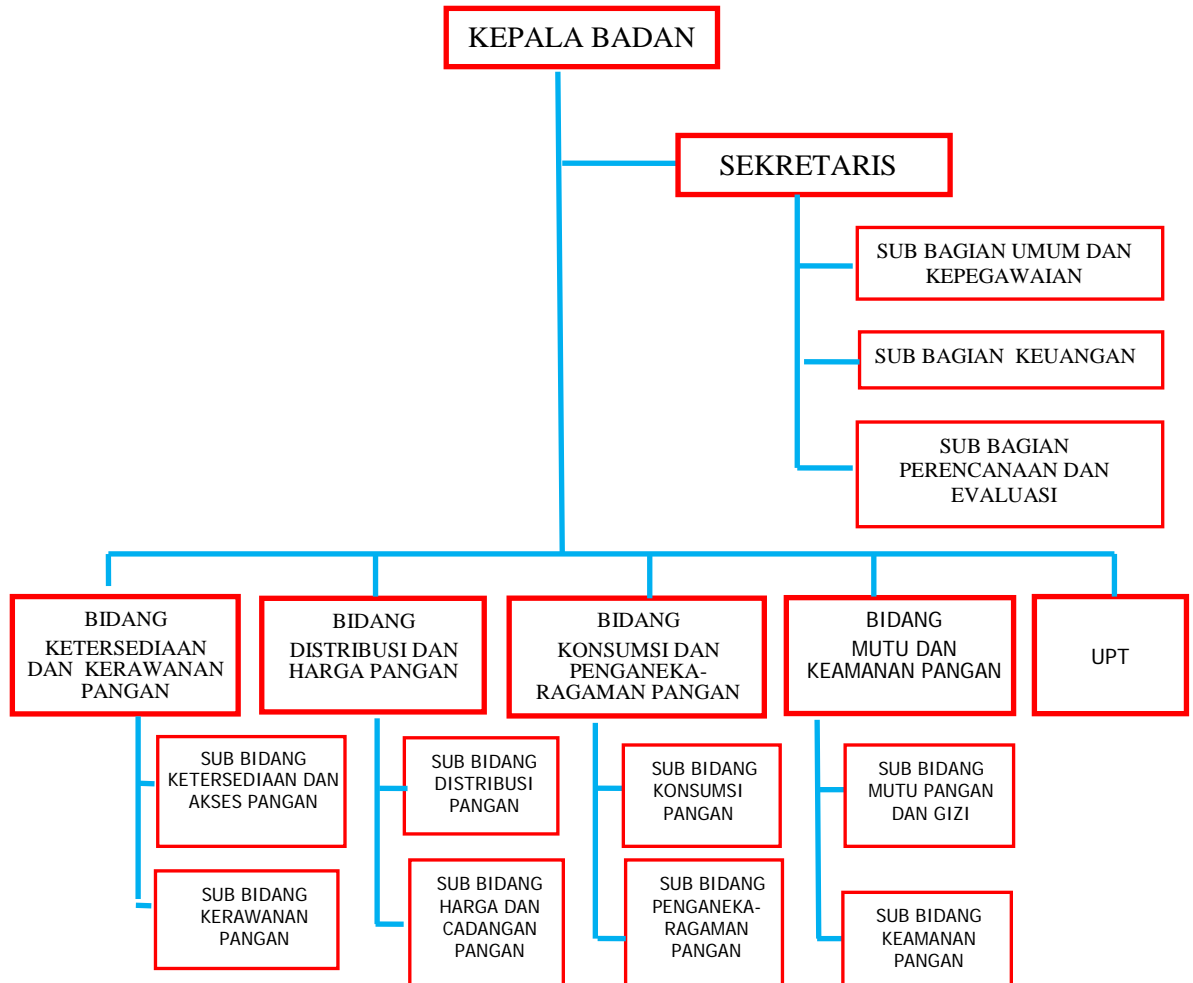
Sumber daya manusia Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2015 berjumlah 77 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 7 Orang PTHL dimana rincian tersebut digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Sumber Daya Manusia Badan Ketahanan Pangan

JUMLAH PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL
PNS : 77	S3 : 0	IV/d : 0	Ess IV = 14	
	S2 : 13	IV/c : 1	Ess III = 6	
	S1 : 39	IV/b : 4	Ess II = 1	
	D4 : 0	IV/a : 6		
	D3 : 2	III/d : 16		
	D2 : 1	III/c : 9		
	D1 : 0	III/b : 22		
	SLTA : 21	III/a : 7		
	SLTP : 1	II/d : 3		
		II/c : 4		
		II/b : 5		
		II/a : 0		
		I/d : 0		
		I/b : 0		
		I/a : 0		
Jumlah PNS	PNS: 77	PNS : 77		

1.1.3 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tergambar dalam bagan dibawah ini:



1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Maksud disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dengan berpedoman pada Renstra - SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

1.2.2 Tujuan Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Tujuan disusunnya Renja Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung adalah:

1. Merumuskan Rencana Kinerja Tahunan program kegiatan dan pendanaan untuk tahun 2016.

2. Memberi arah dan petunjuk tentang tahapan - tahapan program dan kegiatan tahun 2016.

1.3 Ruang Lingkup

Pembangunan ketahanan pangan 2014 di Provinsi Lampung diarahkan guna mewujudkan kemandirian pangan untuk menjamin ketersediaan pangan ditingkat provinsi, kabupaten/kota hingga rumah tangga, serta menjamin konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang di tingkat rumah tangga sepanjang waktu. Kondisi ini dapat dicapai melalui pemanfaatan sumberdaya dan budaya lokal, teknologi inovatif dan peluang pasar, peningkatan ekonomi kerakyatan dan pengentasan kemiskinan.

Pembangunan ketahanan pangan dapat ditempuh dengan beberapa kebijakan dari 3 sub sistem ketahanan pangan yaitu : 1) subsistem ketersediaan; 2) subsistem distribusi; dan 3) subsistem konsumsi; serta 4) subsistem mutu dan keamanan pangan

Kebijakan ketahanan pangan dari aspek ketersediaan diarahkan untuk :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan dan kualitas sumberdaya alam dan air;
2. Menjamin kelangsungan produksi pangan utamanya yang diproduksi;
3. Mengembangkan kemampuan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat;

Kebijakan ketahanan pangan dari aspek distribusi diarahkan untuk :

1. Mengembangkan sarana dan prasarana distribusi pangan untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, termasuk didalamnya mengurangi kerusakan bahan pangan dan kerugian akibat distribusi yang tidak efisien;
2. Mengurangi dan/atau menghilangkan peraturan yang menghambat distribusi pangan antar kabupaten/kota;
3. Mengembangkan kelembagaan pengolahan dan pemasaran di pedesaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas distribusi pangan serta mendorong peningkatan nilai tambah.

Kebijakan ketahanan pangan dari aspek konsumsi diarahkan untuk :

1. Menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi dan bergizi seimbang;

2. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam pemenuhan pangan sebagai implementasi hak atas pangan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil. Balita gizi buruk, dan sebagainya).

Kebijakan ketahanan pangan dari aspek mutu dan keamanan pangan diarahkan untuk :

1. Menjamin mutu pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman dikonsumsi;
2. Mendorong, mengembangkan dan membangun, serta memfasilitasi peran serta masyarakat dalam keamanan pangan sebagai implementasi hak atas pangan;
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi keamanan pangan/pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, ibu hamil. Balita gizi buruk, dan sebagainya).

Dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung, sangat dipengaruhi oleh (1) ketersediaan pangan pokok, menyangkut kebijakan lintas sektor dari hulu sampai hilir seperti kepemilikan lahan yang sempit, akses permodalan petani, distribusi pupuk, kepastian harga jual, petani, penanganan pasca panen; (2) lambatnya penganekaragaman pangan menuju seimbang, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang gizi, menyebabkan konsumsi karbohidrat masih didominasi beras, walaupun sumber lain cukup tersedia secara lokal; (3) masalah keamanan pangan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap keamanan pangan; (4) kerawanan pangan dan gizi, yang sangat berkaitan erat dengan kemiskinan.

Terwujudnya ketahanan pangan merupakan harmonisasi dari bekerjanya 4 subsistem ketahanan pangan, yaitu subsistem ketersediaan pangan, subsistem distribusi pangan dan subsistem konsumsi pangan serta subsistem mutu dan keamanan pangan. Oleh karenanya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Lampung dilakukan pembangunan ketiga subsistem tersebut secara seimbang.

BAB II

VISI DAN MISI RENSTRA 2015-2019

Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah 2015 – 2019

Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung maka disusunlah Rencana Strategik Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang mTerdapat beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja. Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan Jangkemuat arah, kebijakan dan strategi serta program – program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan langsung oleh Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung maupun mendorong Badan Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat.

Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2015 – 2019 dengan penekanan pada pencapaian sasaran prioritas Nasional, Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Renstra Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program, indikator yang akan dicapai sampai tahun 2019.

2.1.1 Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk di wujudkan. Secara ontologis, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri.

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Lampung berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Provinsi Lampung ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Provinsi Lampung dalam periode 2015—2019.

Hal-hal penting memasuki tahapan III dari RPJPD Provinsi Lampung, adalah:

1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan kesejahteraan antar wilayah;
2. Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas jangkauan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan Internasional.
3. Pengembangan, Pemanfaatan dan penerapan Iptek serta Penguatan Inovasi pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan infrastruktur.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Provinsi Lampung menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Provinsi Lampung, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada visi pembangunan jangka panjang Indonesia Tahun 2005-2025 dan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, maka visi Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung sama dengan visi Provinsi Lampung Tahun 2015—2019 yaitu:

“Lampung Maju dan Sejahtera 2019”

Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.

2.1.2 Misi

Pada periode Renstra 2015 – 2019 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, IPTEK dan inovasi, budaya masyarakat dan Toleransi kehidupan beragama
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan lokal, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif

Sektor Ketahanan Pangan masuk dalam **Misi Pertama** dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2015-2019 Provinsi Lampung yaitu : **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Daerah”**.

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (pro growth) melalui pengembangan potensi dan keunggulan yang dimiliki Provinsi Lampung dengan memperkuat investasi (pro investment) diberbagai sektor dan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan kemitraan. Pertumbuhan ekonomi yang kuat ditandai juga oleh upaya pemerataan dengan trickle down effect yang tinggi.

Upaya memperkuat ekonomi Lampung dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki dengan orientasi ekonomi nasional dan global. Ekonomi berbasis agro terus dimantapkan dan diperkuat, kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, perdagangan, dan jasa berbasis teknologi. Investasi baru (dalam dan luar negeri) harus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja. Pembangunan ekonomi dan pemerataannya harus diorientasikan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menurunkan jumlah penduduk miskin. Pembangunan ekonomi tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Perkuatan ekonomi merupakan penciptaan daya saing berkelanjutan atau sustainable competitive advantage sebagai hasil dari pengelolaan sumber daya didukung kompetensi yang tinggi (core competence). Produktivitas barang dan jasa yang dihasilkan dengan kualitas tinggi dan berdaya saing sehingga meningkatkan nilai tambah produk dan kemandirian daerah. Penguatan kemandirian daerah diindikasikan oleh kapasitas fiskal yang tinggi terutama dicirikan oleh pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi.

Dampak akhir dari pembangunan ekonomi Lampung adalah kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Kesejahteraan dicapai melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

Urusan pemerintahan yang terkait dengan Misi 1 antara lain Urusan Pertanian, Urusan Kelautan dan Perikanan, Urusan Kehutanan, Urusan Perindustrian, Urusan Perdagangan, Urusan Pangan, Urusan Koperasi dan UMKM, Urusan Penanaman Modal dan Perijinan, Urusan Pariwisata, serta Urusan Pendapatan.

BAB III

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2016

3.1 TUJUAN

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut :

Tujuan : Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal.

Indikator Tujuan : 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
 2. Jumlah Konsumsi energi (kcal/kap/hr)
 3. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr)
 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
 5. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%)
 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen (Rp.)
 7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen (%)
 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
 9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Tabel 2. Misi, Tujuan dan Indikator Tujuan Jangka Menengah

Misi	Tujuan			
	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target 2019
Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan	Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganekaragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan, dan kualitas konsumsi pangan yang	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	-	87,7
		2. Jumlah Konsumsi energi	Kkal/kap/hr	2.064
		3. Jumlah Konsumsi Protein	Gram/kap/hr	57,00
		4. Skor PPH Ketersediaan	-	88,7
		5. Persentase Jumlah Penduduk Rawan Pangan	%	1 %
		6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen	(Rp.)	≥ HPP
		7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen	%	CV<10%
		8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi	%	10

	aman berbasis sumberdaya lokal	9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	%	80% (dibawah ambang batas)
--	--------------------------------	--	---	----------------------------

3.2 SASARAN

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per-kapita, dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
2. Jumlah Konsumsi energi
3. Jumlah Konsumsi Protein
4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan
5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan
6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen
7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen
8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi
9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji

Indikator Kinerja dari sasaran strategis diatas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Indikator Tujuan dan Sasaran

Visi : Lampung Maju dan Sejahtera 2019				
Misi : Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Memperkuat Kemandirian Pangan				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2019
Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganeka-ragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87,7
	2. Jumlah Konsumsi energi		2. Jumlah Konsumsi energi	2.064
	3. Jumlah Konsumsi Protein		3. Jumlah Konsumsi Protein	57,00
	4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan		4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	88,7
	5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan		5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	1
	6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen		6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen	≥ HPP
	7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen		7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen	CV<10%
	8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi		8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi	10
	9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang di Uji		9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	80% (dibawah ambang batas)

3.2 PROGRAM

Secara umum pembangunan ketahanan pangan tahun 2016 mempunyai program utama yaitu **Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.**

3.3 KEGIATAN

1. PELAYANAN ADMINISTRASI

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6. Penyediaan peralatan rumah tangga
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD
11. Penatausahaan Aset Daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD-
2. Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA SKPD-

5. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN

1. Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu)
2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
3. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah
4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat
5. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan
6. Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan
7. Kegiatan Akses Pangan
8. Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD
9. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Registrasi / Produk yang Beredar
10. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065

11. Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisnis
12. Audit Internal
13. Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi
14. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan
15. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional
16. Promosi Pangan Segar dan Olahan
17. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional
18. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan
19. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar
20. Pengembangan usaha pangan lokal
21. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan
22. Pengembangan Produk Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat
23. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung (DAK+Pendampingan)
24. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga
25. Penyusunan Pola Pangan Harapan
26. Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)

3.4 MATRIK RENCANAN KINERJA TAHUNAN 2016

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai matrik rencana kinerja tahunan sesuai dengan sasaran Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung, berikut adalah sasaran strategis Target Tahun 2016 Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
			2016
Mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan melalui penganeka-ragaman pangan, penguatan ketersediaan, distribusi pangan dan kualitas konsumsi pangan yang bermutu dan aman berbasis sumberdaya lokal	Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85,0
		2. Jumlah Konsumsi energi	2.019
		3. Jumlah Konsumsi Protein	56,30
		4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	85,6
		5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan	1
		6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat produsen	≥ HPP
		7. Koefisien Variasi Pangan (beras) di tingkat konsumen	CV < 10%
		8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi	10
		9. Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang diuji	80% (dibawah ambang batas)

3.5 ANGGARAN TAHUN 2016

Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 akan mengelola belanja langsung sebesar Rp. 6.500.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. PELAYANAN ADMINISTRASI

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik beranggarkan Rp102.000.000,- dengan target kinerja 12 bulan layanan. Kegiatan ini bertujuan untuk pembiayaan telephone, PAM dan PLN
2. Penyediaan jasa administrasi keuangan beranggarkan Rp.190.900.000,- dengan target kinerja 12 bulan layanan. Kegiatan ini bertujuan untuk honorarium PPA, PTHL, Bendahara dan Pengurus Barang.
3. Penyediaan alat tulis kantor. Kegiatan ini bertujuan untuk honorarium PPA, PTHL, Bendahara dan Pengurus Barang. Kegiatan ini bertargetkan 12 bulan layanan dengan anggaran Rp. 25.000.000
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Kegiatan ini bertujuan untuk fotocopy dan mencetak barang cetakan seperti Cetak Kartu Ucapan dan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 16.700.000,- dan target kinerja 12 bulan layanan.
5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor bertujuan untuk mendukung fasilitas instalasi listrik/penerangan bangunan berupa pembelian lampu dan kabel dan alat-alat listrik lainnya Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan target kinerja 12 bulan layanan.
6. Penyediaan peralatan rumah tangga bertujuan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta kebersihan kantor Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan anggaran sebesar Rp.12.500.000,- dan target kinerja 12 bulan layanan.
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk penyediaan bahan bacaan berupa koran dan peraturan perundang-undangan pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung dengan anggaran sebesar Rp. 16.500.000,- dan target kinerja jumlah eksemplar yaitu 11 eksemplar koran daerah dan 1 eksemplar koran nasional.
8. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan tujuan terlaksananya rapat dan konsultasi ke pusat dan mengikuti agenda-agenda pusat. Kegiatan ini dengan anggaran Rp.150.000.000,- dengan target kinerja 12 bulan layanan.

9. Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah dengan tujuan terlaksananya rapat antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kooridnasi ke Kab/Kota se-Provinsi Lampung. Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 141.000.000,- bertargetkan 12 bulan layanan.
10. Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD bertujuan untuk agar sistem pengelolaan keuangan pada Badan Ketahanan Pangan dapat berjalan dengan baik. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 87.600.000,- dengan target kinerja 12 bulan layanan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Penatausahaan Aset Daerah Kegiatan ini bertujuan agar aset Badan Ketahanan Pangan dapat tertata dengan baik,pada tahun ini juga diadakan sensus barang. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 10.000.000,- Target kinerja dari kegiatan ini adalah 12 bulan layanan.

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara Kendaraan dinas roda 4 sejumlah 5 unit Kegiatan ini mempunyai anggaran sebesar Rp. 100.000.000,-.
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Kegiatan ini berupa Pemeliharaan Komputer dan AC pada Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 15.000.000,-
3. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Kegiatan ini bertujuan untuk merehab gedung/kantor yang mengalami kerusakan berat/sedang, tahun 2016 akan merehab pintu sebanyak 2 unit dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1. Peningkatan SDM dan Budaya Kerja BKPD Prov. Lampung Kegiatan ini untuk Diklat maupun transport yang diselenggarakan didalam provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 6.000.000. Target dari kegiatan ini adalah 5 Pegawai yang mengikuti Diklat.

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD- Merupakan kegiatan untuk menyusun laporan tahunan dan laporan keuangan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 48.000.000 dengan target kinerja 5 Dokumen antara lain LPPD, LHP, ROK LAKIP dan database ketahanan pangan.
2. Penyusunan Rencana Kerja (RenJa) dan RKA SKPD-. Kegiatan ini merupakan penyusunan Rencana Kerja dan guna pembuatan RKA/DPA Badan Kethanan Pangan Daerah Provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan Rp.

43.750.000,- dengan target kinerja selama 2 Dokumen. Yaitu Renja (Renja dan RKT) dan DPA (RKA dan DPA).

5. PENINGKATAN DIVERSIFIKASI & KETAHANAN PANGAN

1. Peningkatan, Penerapan Standar BMR (Batas Maksimum Residu) Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran petugas/masyarakat (produsen/ petani/pedagang dan konsumen) tentang penerapan batas maksimum residu (BMR) pestisida. Pemantauan terhadap ada tidaknya residu pestisida pada sayur dan buah segar dari kabupaten/kota dilaksanakan melalui pengambilan sampel. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 150.000.000,-. Kegiatan ini bertargetkan 15 kab/kota yang terbina batas minimum residu.
2. Pengembangan Desa Mandiri Pangan. Kegiatan ini berupaya untuk penurunan daerah rawan pangan. Kegiatan Desa Mandiri Pangan merupakan model kegiatan strategis dengan maksud untuk dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pembangunan ketahanan pangan nasional dimulai dari wilayah terkecil yaitu desa, dengan melihat keterpaduan sarana dan prasarana dari aspek ketersediaan distribusi, konsumsi pangan rumah tangga dan potensi desa yang ada dari waktu ke waktu. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 100.000.000,- dengan target 6 kawasan mandiri pangan yang terbina dalam upaya penurunan daerah rawan pangan
3. Analisa dan Pemantauan SKPG dan PDRP Kegiatan ini dalam rangka Pemantauan SKPG dan PDRP. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 75.000.000,- dengan target kinerja 1 Dokumen hasil pemantauan SKPG dan PDRP.
4. Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Kegiatan ini berupa pengadaan Cadangan Pangan berupa pembelian beras dan di titipkan pada Perum Bulog. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 315.000.000,- dengan rencana pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah Provinsi Lampung sebesar 35 Ton yang dititipkan pada Perum Bulog
5. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Kegiatan ini bertujuan untuk memberdayakan lumbung pangan berupa pertemuan kepada kelompok lumbung masyarakat. Kegiatan ini beranggarkan Rp.25.000.000 dengan target 6 Kab/Kota yang terbina dan sebanyak 18 kelompok lumbung.
6. Analisa dan Penyusunan Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan. Kegiatan ini adalah kegiatan analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerawanan pangan. Kegiatan ini beranggarkan Rp.100.000.000,- dengan target kinerja 1 Dokumen berupa Peta dan laporan kegiatan.
7. Pemberdayaan GAPOKTAN dalam rangka stabilisasi harga pangan Kegiatan

ini memberdayakan Gapoktan agar dapat menstabilkan harga berupa pertemuan dan laporan. Anggaran pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 100.000.000,- dengan taret kinerja 83 gapoktan yang diberdayakan pada kegiatan ini.

8. Kegiatan Akses Pangan Kegiatan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan bagi masyarakat dan menganalisis tingkat keterjangkauan pangan dan atau ketahanan pangan rumah tangga. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 50.000.000,- dengan target kinerja sebanyak 1 Dokumen akses pangan.
9. Operasional Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD. Kegiatan ini untuk pembiayaan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan OKKPD selama 12 Bulan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperlancar operasional kelembagaan OKKPD dan menguatkan kelembagaan dan pengawasan keamanan pangan segar, memasyarakatkan sertifikasi dan atau registrasi kepada pelaku usaha dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia OKKPD agar lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi OKKPD. Kegiatan ini beranggarkan Rp 50.000.000,-
10. Surveilen dan Pengawasan Produk Hasil Pertanian Yang Sudah Sertifikasi / Registrasi / Produk yang Beredar merupakan kegiatan survei dan pengawasan terhadap produk/komoditas yang telah tersertifikasi dan untuk mengetahui konsistensi pelaku usaha baik kelompok atau perorangan yang telah mendapatkan Sertifikat Prima dan atau register, memberikan jaminan dan perlindungan kepada konsumen terhadap barang yang telah registrasi prima 3. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 75.000.000,- dengan target 15 pelaku usaha yang tersurveilen/ yang konsisten mengenai jaminan mutu yang telah bersertifikat.
11. Penyempurnaan Dokumen Sistem Mutu Mengacu pada ISO/IEC 17065 Kegiatan ini merupakan agar Dokumen pada Sistem Mutu mengacu pada ISO/IEC 17065. Anggaran pada kegiatan ini adalah Rp. 20.000.000,- dengan jumlah dokumen: 4 dokumen yang mengacu pada sistem mutu.
12. Sertifikasi, Registrasi Produk Labelisasi Prima 3 mendukung Terminal Agrobisnis. Kegiatan ini bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk pangan buah dan sayur segar yang dikonsumsi memiliki mutu baik dan aman untuk dikonsumsi, meningkatkan daya saing produk sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah yang lebih baik. Target dari kegiatan ini adalah 30 pelaku usaha dengan anggaran Rp. 180.000.000,-
13. Audit Internal. Kegiatan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki manajemen

OKKP-D Provinsi Lampung baik di bidang administrasi, bidang dokumen sistem mutu dan bidang teknis operasional lapangan. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 40.000.000,- dengan target kinerja 3 bidang yang di audit yaitu Administrasi, Mutu dan Teknis.

14. Promosi Produk Unggulan Lampung Yang Sudah Sertifikasi/Registrasi
Kegiatan ini berupa kegiatan Pameran yang diikuti Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung yang mewakili Provinsi Lampung di Tingkat Nasional. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 30.000.000 dengan target kinerja 1 kali pameran.
15. Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat dalam menembangkan makanan pokok pengganti beras. Kegiatan ini bertargetkan pengembangan beras siger di 15 kab/kota dan seluruh satuan kerja pemerintah daerah. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 80.000.000,-
16. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Nasional Kegiatan ini dilaksanakan bertepatan dengan Hari Pangan Sedunia baik tingkat Nasional maupun tingkat Provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 95.000.000,- dengan target kinerja jumlah lomba yang diselenggarakan dan diikuti sebanyak 2 kali.
17. Promosi Pangan Segar dan Olahan. Kegiatan ini berupa mengikuti pameran pada acara Lampung Fair. Kegiatan ini beranggarkan Rp.194.00.000 dengan target kinerja 1 kegiatan.
18. Hari Pangan Sedunia Tk. Provinsi dan Tk. Nasional. Kegiatan ini bertujuan terselenggaranya Peringatan Hari Pangan Sedunia tingkat Provinsi Lampung yang didalamnya terdapat pemberian hadiah bagi pemenang Adhikarya Pangan Nusantara Tingkat Provinsi Lampung dan mengikuti kegiatan Hari Pangan Sedunia tingkat Nasional. Kegiatan ini beranggarkan Rp.300.000.000,- dengan target 2 kali baik menyelenggarakan maupun mengikuti.
19. Konsolidasi Dewan Ketahanan Pangan Kegiatan ini berupa Rapat koordinasi Pokja Teknis dan Rapat Koordinasi Pokja Ahli serta Rapat Pleno antar lingkup Dewan Ketahanan Pangan. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 158.050.000,- dengan target kegiatan sebanyak 4 kali baik itu rapat koordinasi/rapat pleno.
20. Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar Kegiatan bertujuan meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan keamanan pangan (Sistem Jejaring Keamanan Pangan yang terpadu) antar instansi terkait di Provinsi Lampung, dan terpromosikannya keamanan pangan segar ke Kabupaten/Kota. Kegiatan ini menitikberatkan pada Inspeksi Mendadak (Sidak) ke Pasar Tradisional maupun modern. Kegiatan ini beranggarkan

21. Pengembangan usaha pangan lokal Inti dari kegiatan ini adalah mengembangkan usaha pangan berbasis pangan lokal. Kegiatan ini berupa hibah alat untuk pengembangan pengolahan pangan lokal. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 156.000.000,- dengan target 7 unit alat yang di hibahkan
22. Pemantauan dan Pengendalian Mobilitas Pangan Kegiatan ini bertujuan menyusun data pengendalian mobilitas pangan dan untuk menyusun peta jaringan distribusi pangan di Provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 50.000.000,- dengan target komoditi 1 komoditi.
23. Pengembangan Produk Pangan Segar yang Bermutu dan Bersertifikat. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui data standarisasi mutu pangan segar dalam rangka pengembangan produk pangan segar yang bernutu. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 80.000.000,- dengan target kinerja 1 Dokumen.
24. Pembangunan Gedung Kantor dan Laboratorium Pengujian Mutu dan Sarana Prasarana OKKPD Provinsi Lampung (DAK+Pendampingan). Kegiatan ini berupa pengadaan kantor, laboratorium dan sarana dan prasarana pengujian mutu OKKPD bertarget kinerja 1 unit. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 2.755.000.000,-
25. Sosialisasi dan Promosi Peningkatan Gizi Pangan Keluarga. Kegiatan ini berupa sosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga di kabupaten/kota. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 40.000.000,- dengan target 15 Kabupaten/Kota yang tersosialisasi.
26. Penyusunan Pola Pangan Harapan. Kegiatan ini bertujuan untuk penyusunan laporan Pola Pangan Harapan Provinsi Lampung. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 47.000.000,- dengan target 1 Laporan Pola Pangan Harapan Provinsi Lampung.
27. Pembinaan dan Pemantauan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL). Kegiatan ini merupakan pembinaan Kawasan Rumah Pangan Lestari yang telah diberikan dana Bantuan Sosial. Kegiatan ini berupa pertemuan dan pemantauan ke kabupaten/kota. Kegiatan ini beranggarkan Rp. 50.000.000,- dengan target yang terbina adalah 15 kabupaten/kota.

BAB IV

P E N U T U P

Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan perlu adanya koordinasi dalam perumusan kebijakan dan langkah-langkah implementasi pemantapan ketahanan pangan masyarakat. Diharapkan pemerintah dapat terus memfasilitasi pengembangan Desa Mandiri Pangan, penyediaan lumbung pangan/tunda jual, diversifikasi pangan, operasionalisasi OKKPD Provinsi Lampung, dan penanggulangan daerah rawan pangan baik melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Rencana Kerja Tahunan Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pada tahun 2016.

Dalam proses implementasi program/kegiatan dan anggaran Program Peningkatan Diversifikasi Pangan dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tahun 2016 Provinsi Lampung diharapkan dukungan semua pihak terutama pada aspek manajemen perlu memperhatikan dan menerapkan sesuai ketentuan dan peraturan tentang administrasi dan keuangan yang telah ditentukan.

LAMPIRAN

**Lampiran I. Rencana Kinerja Tahun 2016 Dana APBD
Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Terpenuhinya Kebutuhan Konsumsi Pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi 2. Jumlah Konsumsi Energi (kkal/kap/hr) 3. Jumlah Konsumsi Protein (gram/kap/hr) 4. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan 5. Persentase Penurunan Jumlah Penduduk Rawan Pangan (%) 6. Harga Gabah Kering Panen (GKP) di Tingkat Produsen 7. Coefisien Variasi Pangan Beras di Tingkat Konsumen 8. Persentase Peningkatan Produk Pangan Segar yang Tersertifikasi (%) 9. Persentase Tingkat keamanan Pangan Segar yang di Uji (%)	85,0 2.019 56,3 85,6 1% HPP ≤ CV < 10% 10% 80%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pelayanan Administrasi perkantoran	Rp. 762.200.000	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 125.000.000	APBD
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 6.000.000	APBD
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 91.750.000	APBD
5. Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan	Rp. 5.515.050.000	APBD
Jumlah	Rp. 6.500.000.000	

Telukbetung, Desember 2015

**KEPALA BADAN
KETAHANAN PANGAN DAERAH,**

Ir. KUSNARDI, M.Agr.Ec.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631123 198803 1 005

Lampiran Rencana Kinerja Tahun 2016

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016	Rencana Aksi Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rencana Aksi Kinerja Output				
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Terpenuhinya kebutuhan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman untuk memenuhi kecukupan energi per kapita	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	85				85	1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Peningkatan Ketahanan Pangan							
	Jumlah Konsumsi Energi	2.019				2019	- Gerakan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan	Jumlah Kabupaten/kota yang termotivasi untuk mengembangkan makanan pengganti beras	15 Kab/Kota				15	
	Jumlah Konsumsi Protein	56,3				56,3	- Lomba cipta menu tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah lomba yang di ikuti/ diselenggarakan	2 kali			1	1	
							- Promosi pangan segar dan olahan	Jumlah promosi pangan segar	1 kali			1		
							- Hari pangan sedunia tk. Provinsi dan Nasional	Jumlah kegiatan pameran peringatan HPS	2 kali			1	1	
							- Konsolidasi dewan ketahanan pangan	Jumlah rapat/koordinasi dan konsultasi	4 kali	1	1	1	1	
							- Pengembangan usaha pangan lokal	Jumlah hibah alat untuk pengembangan pengolahan pangan lokal	7 unit				7	
							- Penyusunan pola pangan harapan	Jumlah laporan pola pangan harapan di Provnsi Lampung	1 laporan					1
							- Pembinaan dan pemantauan kawasan rumah pangan lestari (KRPL)	Jumlah kab/kota yang terbina dalam pemanfaatan pekarangan untuk peningkatan gizi keluarga	15 Kab/Kota					15
	Skor pola pangan harapan (PPH) ketersediaan	85,6				85,6	- Pengembangan lumbung pangan masyarakat	Jumlah lumbung yang dibina	18 lumbung				18	
							- Pengembangan cadangan pangan pemerintah daerah	Jumlah cadangan pangan pemerintah (ton)	35 ton			35		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016	Rencana Aksi Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rencana Aksi Kinerja Output				
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan	1%				1%	- Pengembangan desa mandiri pangan	Jumlah kawasan desa mandiri pangan yg terbina	6 kawasan			6		
							- Analisa dan penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan	Jumlah dokumen peta ketahanan dan kerentanan pangan	1 dokumen				1	
							- Analisa dan pemantauan SKPG dan PDRP	Jumlah laporan pemantauan SKPG	1 laporan				1	
	Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat produsen	HPP ≤				HPP ≤	- Pemberdayaan gapoktan dalam rangka stabilisasi harga pangan	Jumlah gapoktan yang diberdayakan	83 gapoktan			83		
	Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen	CV < 10%				CV < 10%	- Kegiatan akses pangan	Jumlah dokumen data dan informasi akses pangan	1 dokumen					1
							- Pemantauan dan pengendalian mobilitas pangan	Jumlah komoditi yg terpantau & terawasi mobilitas pangannya	1 komoditi				1	
	Persentase Peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi	10%				10%	- Penyempurnaan dokumen sistem mutu mengacu pada ISO/IEC 17065	Jumlah dokumen sistem mutu sesuai dengan SNI ISO/IEC 17065:2012	4 dokumen				4	
							- Audit internal	Jumlah bidang yang di audit	3 Bidang				3	
							- Promosi produk unggulan lampung yang sudah sertifikasi/registrasi	Jumlah promosi produk unggulan Lampung yang sudah di sertifikasi	1 kali				1	
						- Pengembangan produk pangan segar yang bermutu & bersertifikat	Jumlah laporan data standarisasi mutu pangan segar dalam rangka pengembangan produk pangan segar yang bermutu	1 dokumen					1	
						- Operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD	Pembiayaan operasional pengawasan mutu dan keamanan pangan OKKPD	12 bulan	3	3	3	3		
						- Surveil dan pengawasan produk hasil pertanian yg sudah sertifikasi/	Jumlah pelaku usaha yang konsisten mengenai penerapan	15 pelaku usaha				15		

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2016	Rencana Aksi Kinerja Sasaran				Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Rencana Aksi Kinerja Output			
			TW I	TW II	TW III	TW IV				TW I	TW II	TW III	TW IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							registrasi/produk yang beredar	jaminan mutu produk pangan segar hasil pertanian yang telah bersertifikasi/terregistrasi					
							- Sertifikasi/registrasi produk labelisasi prima 3 mendukung terminal agrobisnis	Jumlah pelaku usaha yang akan disertifikasi,registrasi	35 pelaku usaha			35	
							- Pembangunan gedung kantor, laboratorium UPT OKKPD Provinsi Lampung dan sarana prasarana OKKPD (DAK + pendampingan)	Jumlah gedung kantor/ laboratorium dan sarana prasarananya	1 unit				1
							- Bimtek Penerapan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Pertanian di Lokasi Sentra	Jumlah kab/kota yang diterapkan mutu keamanan di lokasi sentra	3 Kab		1	2	
	Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji	80%				80%	- Sosialisasi dan promosi peningkatan gizi pangan keluarga	Jumlah kab/kota yang tersosialisasi peningkatan gizi pangan keluarga	15 Kab/kota				15
							- Pengembangan jejaring keamanan pangan dan promosi keamanan pangan segar	Jumlah kab/kota yang terbina & terawasi keamanan pangan segar	15 Kab/Kota			15	
							- Peningkatan penerapan standar BMR (Batas maksimum residu)	Jumlah Kab/Kota yang terbina mengenai batas maksimum residu	15 Kab/Kota				15
							- Pemantauan dan Pengawasan Pengembangan Pasar Pangan Segar yang Bermutu dan Aman	Jumlah Kab/Kota yang terpantau	15 Kab/Kota				15
							- Bimtek Penerapan Mutu dan keamanan pangan hasil pertanian	Jumlah Peserta Bimtek	30 Orang			30	